

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Azmi Fendri. 2016. *Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batu Bara*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Bambang Sunggono. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Gatot Supramono. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*. Rineka Cipta: Jakarta.
- M.Hadjon Philipus. dkk. 2005. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- Nandang Sudrajat. 2010. *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*. Pustaka Yustisia : Jakarta.
- Prajudi Atmosudirjo. 1994. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Salim HS. 2007. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Siswanto Suarno. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2017. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia UI Press.
- Sukanda Husin. 2008. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Takdir Rahmadi. 2011. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun*. Airlangga University Press: Surabaya.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan..

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Penertiban Pertambangan Emas Liar Tanpa Izin (PETI) di Kuantan Singingi.

## **C. Internet**

<<https://media.neliti.com/media/publications/26601-ID-implikasi-hukum-terkait-pertambangan-rakyat-dalam-bidang-minerba-di-indonesia.pdf>>  
[9/01/19]

<<http://id.m.wikipedia.org>>[3/4/19]

<<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/pwk/article/view/21304>>

<<https://www.riau.go.id/home/skpd/2017/06/22/2856-rapat-koordinasi-pengendalian-kerusakan-akibat-aktifitas>>